

# Peran UNDP Dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sudan Selatan Melalui Program UNSCR 1325

Ni Made Resita Yuana<sup>1)</sup>, Sukma Sushanti<sup>2)</sup>, A.A Bagus Surya Widya Nugraha<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [yuanaresita@unud.ac.id](mailto:yuanaresita@unud.ac.id)<sup>1</sup>, [sukmasushanti@unud.ac.id](mailto:sukmasushanti@unud.ac.id)<sup>2</sup>, [aabasuwinu@unud.ac.id](mailto:aabasuwinu@unud.ac.id)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*As a new independent nation, the rate of violence against women in South Sudan is quite high. One of the reasons for this incident is the legacy of the conflict before the independence of southern Sudan. The high level of violence against women in South Sudan managed to steal the attention of the world including the United Nations. UNDP (United Nations Development Program) works with the South Sudan's government to address this issue. One of the strategies used is UNSCR 1325 (United Nations Security Council Resolution) program. Addressing the problem of how UNDP's role in helping address the issue of violence against women in South Sudan through the UNSCR program 1325, this study aims to analyze the role of UNDP as an international organization in a domestic issue of a country where the country with the government as its highest capacity has failed to provide protection to its citizens, especially women. The concept which used in this study is the role and function of international organizations and it is not intended to show the success or failure of the program applied. This study uses a descriptive qualitative method using official documents issued by the governments of South Sudan and the United Nations as data sources.*

**Keywords:** *international organization, South Sudan government, gender-based violence, women, UNDP, UNSCR1325.*

## 1. PENDAHULUAN

Penyelesaian kasus Sudan Selatan oleh UNDP melalui pembangunan infrastruktur penting dan penyampaian layanan untuk mencapai lima hasil. Pendekatan pengembangan kapasitas UNDP difokuskan untuk memberikan pelatihan dan pembinaan langsung di tempat kerja, pelatihan teknis, dan membina hubungan Sudan Selatan melalui penyebaran pegawai sipil daerah ke kementerian, komisi, pemerintah negara bagian dan daerah. Selain itu, di tingkat komunitas, UNDP memberikan pelatihan dan pendidikan kewarganegaraan tentang hak warga negara. Pendekatan UNDP untuk penyediaan layanan berfokus pada

mendukung perluasan kehadiran pemerintah melalui pembangunan infrastruktur penting dan pengembangan kapasitas lembaga-lembaga pemerintah yang penting.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang pertama yang digunakan adalah laporan berjudul *Violence, Exploitation, and Abuse and Discrimination in Migration Affecting Women and Children in ASEAN: A Baseline Study* by Jaclyn Ling-Chien Ne. Secara garis besar, Ling-Chien Ne menjelaskan bagaimana ASEAN melihat

kasus kekerasan terhadap wanita di Malaysia.

Tinjauan pustaka kedua menggunakan penelitian berjudul *Aid, Conflict, and Peacebuilding in Afghanistan* karya Haneef Atmar dan Jonathan Goodhand yang dipublikasikan tahun 2002. Penelitian tersebut memaparkan tentang proses pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional seperti PBB, *inter-governmental organization* (IGO), dan *non-governmental organization* (NGO) kepada Afghanistan. Atmar dan Goodhand (2002) memulai penelitiannya dengan menjelaskan proses dan fase-fase konflik yang terjadi di Afghanistan.

### 3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian mengenai peran UNDP dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Sudan Selatan melalui program UNSCR 1325 ini menggunakan metode penelitian quasi kualitatif. Penelitian ini akan melihat subjek subjek yang terkait dalam menghadapi suatu fenomena dan berupaya untuk mencari suatu solusi bagi masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, dijelaskan bagaimana upaya Sudan Selatan dalam kasus penyeteraan gender kurang berhasil, sehingga membutuhkan bantuan pihak luar yakni UNDP dengan program UNSCR 1325. Penelitian ini akan menjelaskan apa upaya kedua subjek tersebut dalam mengatasi masalah penyeteraan gender tersebut.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran UNDP di Sudan Selatan didasarkan pada segi instrumen (alat/sarana) dan segi pelaku/aktor. Berikut merupakan penjelasan mengenai peran UNDP sebagai organisasi internasional untuk Sudan Selatan.

#### Segi Instrumen

Dalam mencapai tujuan penanganan di Sudan Selatan, UNDP melaksanakan program-program capaian yang meliputi Core Governance and Civil Service Function; Food Insecurity and Household Income; Key Service Delivery are in Place; Violence is Reduced and Community Security Improves; Access to Justice and The Rule of Law Increases. Pelaksanaan Core Governance and Civil Service Function berupa "Dukungan untuk Administrasi Publik". Dukungan untuk Proyek Administrasi Publik bertujuan untuk mendukung reformasi sektor publik dan pengembangan kapasitas untuk layanan sipil di Sudan Selatan. Komponen terbesar proyek ini melibatkan kerja sama regional melalui pengerahan pegawai negeri yang memenuhi syarat dari tiga negara yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah untuk Pembangunan, Ethiopia, Kenya dan Uganda.

Pelaksanaan program ini, petugas Civil Service Support (CSSOs) menghabiskan dua tahun di pos di lembaga pemerintah yang bekerja bersama rekan-rekan nasional. Mereka memberikan dukungan sehari-hari melalui bimbingan dan pembinaan di bidang perumusan kebijakan serta di tingkat teknis. Proyek ini berfokus pada lembaga layanan sipil nasional dan

tingkat negara bagian diperkuat, guna memperdalam demokrasi untuk membantu konsolidasi penyelesaian politik dalam kerangka konstitusionalisme. Pelaksanaan program yang bekerja sama dengan lima *Community Services Officer* (CSO) memperoleh keluaran hasil berupa meningkatkan kesadaran pemerintahan demokratis tingkat masyarakat dengan melakukan 38 program penjangkauan pendidikan kewarganegaraan di delapan kabupaten di Juba, Yei, Lanya, Morobo, Kajo-Keji, Terekeka, Mundri Timur, dan Barat serta kegiatan ini mencapai total 5.312 orang (932 wanita). Selain itu mempromosikan dialog tentang akuntabilitas dengan mengadakan 27 acara bincang-bincang radio tentang resolusi konflik, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pemuda dan wanita dalam keselamatan masyarakat dan pembangunan perdamaian di negara-negara Equatoria Tengah dan Barat.

Setelah dilakukan dukungan untuk Adminitrasi Publik dilanjutkan dengan dukungan untuk Keuangan Publik yang terfokus pada pencapaian UNDP dalam memberikan bantuan teknis kepada pemerintah negara bagian pada perencanaan anggaran dan manajemen keuangan publik, dan penyebaran data sosial ekonomi melalui platform manajemen informasi online. Peran ini dihasilkan berupa kebijakan dan struktur tarif pajak terpadu yang dikembangkan mengikuti konsultasi dan lokakarya tingkat negara bagian yang luas di masing-masing negara bagian. Pemerintah negara bagian menyetujui dan setuju untuk menyajikan kebijakan dan

struktur dalam majelis legislatif negara bagian. Pelaksanaan program ini untuk mewujudkan tujuan UNDP sebagai organisasi internasional yang memiliki kewajiban untuk mendukung pemerintahan dengan sistem demokratis.

Hasil program yang kedua oleh UNDP didasarkan pada segi “Kerawanan Pangan Kronis Berkurang dan Pendapatan Rumah Tangga Meningkatkan”. Dalam hal ini diwujudkan dalam pertumbuhan inklusif dan pengembangan kapasitas perdagangan. Proyek ini bertujuan untuk mendukung upaya Pemerintah dan mitra kemanusiaan dalam menangani pemulihan dan transisi ke pembangunan terutama untuk pengungsi internal. Proyek ini berfokus pada stabilisasi mata pencaharian yang berkelanjutan bagi pengungsi dan komunitas tuan rumah dari negara-negara yang terkena dampak konflik di Khatulistiwa Pusat, Jonglei, Hulu, dan Kesatuan. Tindakan yang dilakukan berupa pembangunan 48 kios pasar tambahan di Mingkaman dengan seratus dua puluh lima penduduk setempat (64 perempuan) terlibat dalam uang tunai untuk bekerja di pekerjaan konstruksi, menghasilkan pendapatan sekitar USD5.600. Sebagai sumber daya bersama, pasar telah menciptakan keterkaitan ke belakang dan ke depan termasuk mendorong kohesi sosial yang kuat di antara anggota masyarakat terlepas dari komunitas asal mereka, memberi insentif pada produksi pertanian skala kecil, menawarkan situs tenaga kerja yang mempekerjakan aktor sektor swasta, dan mempromosikan pertukaran barang dan layanan untuk populasi lokal lebih dari 50.000 orang.

Hasil capaian lain yaitu dalam sistem kesehatan, dimana UNDP adalah penerima utama untuk sumber dana Global di Sudan Selatan. Melalui sumber daya ini, UNDP terus mendukung sistem kesehatan Sudan Selatan melalui penyediaan dan rehabilitasi infrastruktur penting dan pembangunan kapasitas kekuatan kesehatan. Dalam kemitraan dengan Global Fund dan Departemen Kesehatan, UNDP membangun lima klinik perawatan sebelum kelahiran, tiga bangsal bersalin, dan dua laboratorium negara. Fasilitas ini menguntungkan 239.301 ibu dan berkontribusi pada peningkatan cakupan ANC hingga 53 persen di negara itu dari 34 persen pada tahun 2012. UNDP mendukung pembentukan laboratorium kesehatan umum TBC dan HIV / *polymerase chain reaction* (PCR) dan terus mendukung operasi Pusat Transfusi Darah Nasional di Juba dan Wau.

UNDP menyediakan obat dan tes diagnostik untuk kesabaran adalah semua TBC, 24 ARV & ART, dan 50 persen dari 72 Pencegahan penularan ibu ke anak (PMTCT) di Sudan Selatan. Ini memungkinkan 15.674 Orang yang Hidup dengan HIV&AIDS (ODHA) dan 10.613 kasus TB menerima perawatan. Empat puluh satu persen dari sekitar 9.000 ibu hamil yang terinfeksi HIV&AIDS + menerima profilaksis ART untuk mencegah penularan ibu ke anak seperti yang dilakukan 13 persen dari 168.790 ODHA yang membutuhkan ARV (dari 7 persen pada tahun 2014). Tujuh puluh lima persen dari mereka ODHA dipertahankan pada pengobatan, 12 bulan setelah memulai

pengobatan (dibandingkan dengan 70 persen pada tahun 2013).

Selain itu UNDP juga menyebarkan tutor keperawatan dan mid-wife kepada institusi pengajaran medis, yang mengarah pada kelulusan 47 perawat dan 39 siswa kebidanan pada bulan Desember 2015. 353 pekerja kesehatan lainnya menerima pelatihan tentang TBC, HIV&AIDS, kesehatan ibu, dan manajemen obat-obatan, catatan menyimpan dan melaporkan. Sebanyak 2.325 pekerja kesehatan telah dilatih sejak 2012.

UNDP melakukan sensitisasi komunitas dan penjangkauan publik tentang rekonsiliasi dan kohesi sosial, yang memberikan 810 warga Sudan Selatan dengan kesempatan untuk membahas isu-isu kepentingan nasional. Inisiatif ini memperlemah narasi perang di beberapa bagian masyarakat, dan memberi masyarakat kesempatan untuk berbagi pengalaman dan menerima umpan balik instan dari para pemimpin selama perdebatan. Ini membantu menjembatani garis patahan sosio-politik yang muncul kembali di dalam dan di antara masyarakat selama konflik. Inisiatif penjangkauan publik termasuk peserta dari masyarakat sipil, pemerintah, akademisi, kelompok wanita, dan partai politik dan komunitas diplomatik. Lebih dari 50 dialog dan konsultasi komunitas dilakukan di seluruh garis sesar konflik di negara Jonglei, Danau, dan Equatoria Timur. Akibatnya, hubungan antarkomunitas meningkat di beberapa area fokus, yang mengarah ke peningkatan keamanan komunitas. Sebagai contoh, warga sekarang dapat

bergerak bebas di wilayah Duk dan Ayod, Negara Jonglei yang tidak mungkin pada tahun 2014. Masyarakat juga berbagi sumber daya komunal secara damai, terutama rawa-rawa nelayan dan lahan penggembalaan.

UNDP mendukung penguatan *South Sudan Peace and Reconciliation Commission* (SSPRC) untuk terlibat dalam diskusi tingkat kebijakan mengenai perdamaian dan rekonsiliasi di tingkat nasional dan negara bagian. Sebagai contoh, forum Kolaborasi Kepemimpinan dan Dialog diadakan dan mengeksplorasi opsi untuk meningkatkan dialog di seluruh perpecahan politik dan penyelesaian perselisihan damai. Peserta diambil dari anggota parlemen, CSO dan pemimpin agama, perwakilan dari organisasi pemuda dan wanita dan para pemimpin opini nasional. Rencana strategis tiga tahun juga dikembangkan dan akan diluncurkan pada tahun 2016. Selain itu, di bawah kepemimpinan SSPRC, proses multi-pihak untuk memperkuat Infrastruktur untuk Perdamaian nasional telah dimulai. Dalam lokakarya perencanaan strategis, berbagai pemangku kepentingan termasuk *National Healing, Peace and Reconciliation Committee* (CNHPR), *the National Platform for Peace and Reconciliation* (NPPR), *the Southern Sudan Women's Peace Network* (SSWPN), *the South Sudan's Church Council* (SSCC), *the South Sudan Islamic Council* (SSIC), Biro Pengawasan Komunitas dan Pengendalian Senjata Kecil, Uni Afrika, donor, Majelis Legislatif Nasional, CSO dan Badan PBB berkomitmen untuk mendukung proses

tersebut. Hal ini merupakan pelaksanaan tanggung jawab UNDP yang memiliki peran serta tujuan dari pencegahan krisis dan pemulihan setelah krisis.

Laporan statistik kejahatan kuartalan Kepolisian Negara Sudan Selatan menunjukkan bahwa insiden kejahatan yang dilaporkan di tujuh negara sasaran berkurang dari 38.328 pada tahun 2014 menjadi 33.005 pada tahun 2015, menunjukkan peningkatan keseluruhan dalam keamanan masyarakat di daerah-daerah di mana UNDP terlibat. UNDP mendukung SSNPS dalam menghasilkan laporan statistik untuk menganalisa pola dan lokasi kejahatan untuk mengurangi kejahatan. Enam belas persen dari sekitar 38.079 personel polisi dikeluarkan kartu identitas setelah latihan verifikasi yang ketat di mana 23.022 (3.348 perempuan) diverifikasi dan disetujui. Proses verifikasi memastikan SSNPS tidak termasuk dugaan pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter yang serius. Basis data kepolisian ini juga akan memungkinkan SSNPS untuk memilih personel polisi yang berkualitas untuk dikerahkan di kepolisian untuk pelaksanaan Perjanjian Perdamaian.

### **Segi Pelaku/Aktor**

Selain berperan sebagai instrumen di Sudan Selatan, UNDP juga menjalankan perannya sebagai pelaku/aktor yang bertindak langsung menangani permasalahan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi akibat pertempuran saudara di Sudan Selatan. UNDP lebih mementingkan

permasalahan yang terjadi dan terlepas dari kepentingan anggota. Program UNDP di Sudan Selatan berfokus pada memajukan kesetaraan gender dan mempromosikan pemberdayaan perempuan.

Menanggapi krisis Desember 2013, UNDP merancang sebuah program "Memperkuat kapasitas nasional untuk Pemulihan Awal, Perdamaian Bangunan dan Rekonsiliasi ". Kebutuhan praktis dan strategis bagi perempuan dan anak perempuan telah diperhitungkan dalam perancangan program dan pelaksanaan. UNDP memperkuat kapasitas Kementerian Kehakiman, Peradilan, Kementerian Dalam Negeri (Polisi dan Penjara) dan pengadilan adat untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan akseptabilitas layanan peradilan untuk pria dan wanita. Baik di saat konflik bersenjata, pasca konflik atau perdamaian, kekerasan seksual berbasis gender tidak dapat dihindari atau tidak dapat diterima, karena merupakan hasil dari ketidaksetaraan gender dan pelanggaran hak asasi manusia. Sejalan dengan UNSCR 1888 dan 1820, UNDP sedang bekerja menekan budaya impunitas terhadap kekerasan seksual berbasis gender melalui dukungan layanan hukum yang responsif terhadap gender baik untuk undang-undang maupun pengadilan adat. Skema pekerjaan UNDP mengakui bahwa wanita bukan hanya korban perang tapi juga memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi (UNDP, Focus on: Advancing Gender Equality and Promoting Women's Empowerment, 2014).

Selanjutnya, pengecualian perempuan dari proses perdamaian membahayakan perdamaian yang berkelanjutan. UNDP mendukung organisasi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian, sejalan dengan UNSCR 1325. Berikut merupakan beberapa peran dan hasil UNDP dalam menekan tingkat ketidaksetaraan gender di Sudan Selatan.

#### 1. Memperkuat Kapasitas Lembaga Hukum

- 1.389 Kasus yang ditangani oleh Unit Perlindungan Khusus di lima negara yang melibatkan perempuan
- 194 kasus GBV yang ditangani oleh Emergency Call Center dari bulan Juli 2014 sampai 31 Januari 2015. ECC memungkinkan akses ke Kepolisian.
- 30 Jaksa dari semua negara yang dilatih tentang gender dan hak asasi manusia (26 laki-laki & perempuan 4)
- 193 personil SSNPS dan pekerja sosial di lima negara bagian yang memberikan pelatihan terkait kekerasan seksual berbasis gender (116 laki-laki dan 77 perempuan)
- 164 Pemimpin adat dari semua negara yang dilatih tentang hak-hak perempuan

#### 2. Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Berkelanjutan

- 30 laki-laki dan 90 pengungsi perempuan berpartisipasi dalam pelatihan ketrampilan mata pencaharian di situs *United Nations Peace Observation Commission* (UNPOC) di Juba dalam menjahit, menata catering dan tata rambut.

- Pada bulan Desember 2014, penerima pelatihan telah berhasil menghasilkan 13.582 orang dengan penghasilan SSP 68.450 (USD22, 080) selama 4 bulan. Pola belanja di kalangan penerima manfaat berubah dengan beberapa tabungan untuk memulai usaha kecil.

- 815 Youth Employment (571 laki-laki & 244 perempuan) di Jonglei State dilatih untuk menanam tanaman. Mereka membajak dan menanam 270 tanaman.

3. Peran Perempuan yang Dipromosikan dalam Pembangunan Perdamaian

158 Wanita dimobilisasi oleh *Women Grassroots Network (WGN)*. WGN telah dibuat di bawah naungan *The National Peace and Reconciliation Platform* yang didukung oleh UNDP. WGN bertujuan untuk meningkatkan suara perempuan dan mempromosikan agenda terpadu untuk perdamaian, penyembuhan dan rekonsiliasi. Perspektif peacebuilding WGN, dipresentasikan pada perundingan perdamaian yang dipimpin oleh IGAD pada bulan Juli 2014 di Addis Ababa.

- 246 wanita dari WGN berpartisipasi dalam sebuah demonstrasi damai di jalan-jalan di Juba pada tanggal 18 September 2014 untuk menuntut perdamaian sebagai bagian dari Aktivisme Tujuh Hari Aktivis Nuklir NPPR.

- 30 Perempuan dari masyarakat Nuer dan Dinka telah bersama-sama mengembangkan sebuah rencana tindakan untuk membantu memulihkan perdamaian antara kedua komunitas di negara bagian

Jonglei, sebagai hasil Prakarsa Damai Dinka-Nuer.

- 15 Anggota parlemen perempuan dimobilisasi oleh WGN untuk membangun jembatan intra-gender dan mempromosikan agenda terpadu untuk perdamaian di kalangan perempuan elit dan mereka yang berada di tingkat akar (UNDP, Focus on: Advancing Gender Equality and Promoting Women's Empowerment, 2014).

## 5. KESIMPULAN

Perang saudara yang terjadi antara Presiden Kiir melawan mantan wakilnya Riek Machar pasca kemerdekaan Sudan Selatan pada 9 Juli 2011 telah memberikan dampak negatif bagi warga sipil Sudan Selatan. Jutaan warga sipil terpaksa mengungsi untuk menghindari pertempuran tersebut. Akibatnya, tingkat kelaparan dan kemiskinan semakin tinggi. Ditambah, banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan Sudan oleh tentara pemerintah sebagai ganti upah menjadikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini mendapat perhatian dunia internasional.

UNDP sebagai salah satu organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) turut memberikan bantuan untuk mengatasi pertempuran saudara dan dampaknya di Sudan Selatan. Salah satu program UNDP untuk Sudan Selatan adalah program UNSCR 1325 yang bertujuan untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam upaya perdamaian dan keamanan.

Sebagai organisasi internasional, UNDP menjalankan 2 peran penting yakni sebagai instrumen dan aktor. Melalui perannya sebagai instrumen, UNDP menjadi jembatan untuk mendorong perubahan utamanya dari badan pemerintahan untuk mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan. Peran kedua yakni sebagai aktor dimana UNDP langsung terjun melaksanakan kebijakan – kebijakan dari segi ekonomi, sosial dan politik demi mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Dapat dilihat juga bahwa meskipun UNDP mampu masuk ke Sudan Selatan dimana awalnya banyak penolakan bahkan dari pemerintahnya sendiri, namun perannya sebagai aktor, UNDP menggunakan kemampuannya yakni *ability to shame* dimana pemerintah Sudan Selatan merupakan objek penting dari tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- African Development Bank, & UNDP. (2015). *South Sudan*. Dipetik November 25, 2017, dari [www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2015/CN\\_data/CN\\_Long\\_EN/](http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2015/CN_data/CN_Long_EN/)
- AnalisisDaily. (2014). *Tingkat Perkosaan di Sudan Selatan*. Dipetik November 5, 2017, dari <http://news.analisdaily.com/read/tingkat-perkosaan-di-sudan-selatan-terbaru/71909/2014/10/11>
- BBC. (2016). *Militer Sudan Memerkosa dan Membakar Perempuan*. Dipetik November 25, 2017, dari <http://www.bbc.com/indonesia/du>
- nia/2016/03/160311\_dunia\_perkosaan\_sudan
- Blair, D. (2014, January 18). *South Sudan army recaptures key state capital*. Dipetik November 25, 2017, dari The Telegraph.
- Bubenzer, F., & Stern, O. (2011). *Hope, Pain & Patience The Lives of Women in South Sudan*. Auckland Park: Jacana Media.
- CARE. (2013). *South Sudan Gender In Brief*. Dipetik November 25, 2017, dari <http://www.care.org/sites/default/files/documents/Gender%20in%20Brief%20South%20Sudan%20.pdf>
- Chandra, D. (2016). *Sudan Selatan Pasca Merdeka (2011-2014)*. *Jurnal Mahasiswa UNY*, 1-20.
- CNN. (2015). *PBB : Kekerasan Seksual Jadi Taktik Perang Kelompok Militer*. Dipetik November 25, 2017, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150415132940-120-46806/pbb-kekerasan-seksual-jadi-taktik-perang-kelompok-militer/>
- Hutapea. (2015). *Mengerikan : Anak-anak Sudan Selatan Diperkosa dan Dilempar ke Api*. Dipetik November 25, 2017, dari Detik News: <https://news.detik.com/internasional/2947815/mengerikan-anak-anak-sudan-selatan-diperkosa-dan-dilempar-ke-api>
- International Development Committee. (2012). *South Sudan: Prospects for Peace and Development*. Dipetik November 25, 2017, dari London: House of Commons: <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmintdev/1570/1570.pdf>
- IRIN. (2014). *South Sudan Capital Faces Worsening Cholera Outbreak*. Dipetik November 25, 2017, dari



- <http://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/04/south-sudan-faces-cholera-outbreak>.
- Johnson, D. H. (2011). *The Root Causes of Sudan's Civil Wars: Peace Or Truce*. Kampala: Fountain Publisher.
- Jones, S. (2014). *South Sudan: Little to Celebrate as War and Hunger Mar Independence Day*. Dipetik November 25, 2017, dari <http://www.theguardian.com/global-development/2014/jul/09/south-sudan-famine-conflict-independence-day>
- Matthew. (2014). *Kekerasan Seksual Merajalela di Sudan Selatan*. Dipetik November 25, 2017, dari <https://dunia.tempo.co/read/616169/kekerasan-seksual-merajalela-di-sudan-selatan>
- MEST. (2015). *Education Statistics for the Republic of South Sudan*. Dipetik November 25, 2017, dari Draft Education Statistics : [www.southsudanemis.org/files/reports/2013/SSEMIS\\_2013\\_National.pdf](http://www.southsudanemis.org/files/reports/2013/SSEMIS_2013_National.pdf)
- Ministry of Health. (2013). *Guidelines for the Prevention of Mother-to-Child Trans-mission and Early Infant Diagnosis of HIV*.
- Nduwimana, F. (2015). *United Nations Security Council Resolution 1325 (2000)*. New York: Department of Economic and Social Affairs United Nations.
- Novelli, M., & et al. (2015). *Education Sector Governance, Inequality, Conflict, and Peace building in*. UNICEF Eastern and Southern Regional Office.
- Pape, U., & N., P. (2015). *Alternative Social Safety Nets in South Sudan: Costing and Impact on Welfare Indicators*. World Bank.
- Sari, A. (2014). *Empat Juta Orang Kelaparan di Sudan Selatan*. Dipetik November 25, 2017, dari Amanda Puspita Sari. Empat Juta Orang Kelaparan di Sudan Selatan. 2014. Tersedia pada <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140910145852-127-2965/empat-juta-orang-kelaparan-di-sudan-selatan/>